

Skripsi_ Fatha_ Aal_ Rahman.docx

by AGUS DEVTECH

Submission date: 03-Jul-2024 07:08AM (UTC+0530)

Submission ID: 2406652795

File name: Skripsi_Fatha_Aal_Rahman.docx (297.55K)

Word count: 8266

Character count: 60530

24

**PENGARUH PELAKSANAAN ANGGARAN DAN EVALUASI
KINERJA TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA PADA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA**



SKRIPSI

23

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat

memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Manajemen

NAMA : Fatha Aal Rahman

NIM : 64201694

PROGRAM STUDI MANAJEMEN

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA

KOTA JAKARTA

2024

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Indonesia sebagai negara demokrasi memiliki struktur pemerintahan yang kompleks dan setiap instansi pemerintahan membutuhkan anggaran dari pemerintah pusat. Anggaran merupakan hal penting dalam organisasi pemerintah karena sangat bergantung terhadap jumlah anggaran yang direalisasikan atau diberikan oleh pemerintah. Menurut Menteri Keuangan, pagu indikatif pemerintah pusat tahun 2024 adalah sebesar RP. 999,99 triliun, dan arah kebijakan belanja pemerintah mencakup prioritas belanja. Selain itu, kebijakan arah juga mencakup belanja kualitas sumber daya manusia (SDM), sinergi pusat-daerah, konsolidasi sumber daya pembangunan kualitas SDM, dan mendukung hilirisasi dan ekonomi hijau.

5

Ketersediaan anggaran belanja KL pagu indikatif tahun 2024 lebih rendah dibandingkan APBN 2023 karena penyediaan anggaran penyelenggaraan pemilu dan pemindahan IKN, kendati demikian kami dalam hal ini Mahkamah Agung akan melihat capaian IKPA masing-masing satker sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan penambahan anggaran kepada satker (RI, 2023).

13

Anggaran merupakan hal penting dalam organisasi pemerintah karena sangat bergantung terhadap jumlah anggaran yang direalisasikan atau diberikan oleh pemerintah, sehingga mampu memungkinkan perolehan secara ekonomi, efektivitas dan efisiensi, serta tujuan dari masing-masing organisasi atau instansi dapat tercapai. Anggaran merupakan tindakan yang dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah yang

19

disusun menurut uraian tertentu secara teratur untuk satu periode (Paat et al., 2019).
Dengan adanya anggaran suatu instansi dapat mengarahkan pembangunan sosial ekonomi, menjamin kelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Anggaran didalam sebuah instansi pemerintah menjadi hal penting bagi berjalannya suatu instansi untuk melaksanakan tugas-tugasnya yang telah diatur dalam Undang-undang. Anggaran bisa saja berpengaruh terhadap evaluasi kinerja dan akuntabilitas kinerja suatu instansi dimana anggaran menjadi tumpuan untuk mencapai tujuan suatu instansi, tanpa adanya anggaran yang berjalan dengan baik maka suatu instansi tidak dapat menjalankan tugas-tugasnya secara optimal. Hal ini sudah diatur dalam instruksi Presiden.

Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) menurut Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 mengatakan bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menyampaikan bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang bertanggung jawab diperlukan adanya laporan yang akuntabilitas kinerja untuk mengetahui kemampuannya dalam perolehan visi, misi dan tujuan organisasi (Ramadhania & Novianty, 2020). Dengan ini menyatakan hal tersebut dapat dipastikan adanya kenaikan kinerja dan publik demi menciptakan keuangan suatu instansi yang efisien dan efektif.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dadan Ginanjar dkk (2021), Ferina Anggraeni dan Suji Abdullah Saleh (2020), dan yang terakhir diteliti oleh Sulfianty

Commented [11]: Studi terdahulu yang pernah dikaitkan variabel Y

dan Agus Baku (2021). Penelitian yang dilakukan sebelumnya berada diluar ibu kota saat ini, dimana penelitian yang sekarang dilakukan berada pada pusat pemerintahan di ibu kota.

Pengadilan Agama Jakarta Utara merupakan salah satu instansi pemerintah di bidang hukum yang berada dibawah Mahkamah Agung RI yang sudah menggunakan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dalam rangka penyusunan laporan kinerja, Pengadilan Agama Jakarta Utara menggunakan kerangka pengukuran kinerja dengan melakukan pengumpulan data kinerja yang melibatkan seluruh bagian di lingkungan Pengadilan Agama Jakarta Utara. Data kinerja yang dikumpulkan berupa target dan realisasi kinerja beserta uraian rinci kinerja, target dan realisasi keuangan, target dan realisasi penggunaan sumber daya, data-data penghargaan, serta informasi lain yang terkait dengan kinerja Pengadilan Agama Jakarta Utara.

Berdasarkan uraian latar belakang dan hasil penelitian terdahulu tersebut, maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Jakarta Utara terkait anggaran berbasis kinerja dari segi pelaksanaan dan evaluasi kinerja dengan mengangkat judul "PENGARUH PELAKSANAAN ANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA PADA INSTANSI PEMERINTAH (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA)".

Commented [12]: lokasi penelitian

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan permasalahan yang telah diungkapkan pada latar belakang, maka penulis dalam penelitian merumuskan masalah yaitu :

1. Apakah terdapat pengaruh dalam pelaksanaan anggaran terhadap akuntabilitas kinerja pada Pengadilan Agama Jakarta Utara?

2. ⁹ Apakah terdapat pengaruh evaluasi kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Pengadilan Agama Jakarta Utara?
3. ²⁴ Apakah terdapat pengaruh pelaksanaan anggaran dan evaluasi kinerja terhadap akuntabilitas kinerja pada Pengadilan Agama Jakarta Utara?

² 1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah penelitian yang penulis paparkan diatas, maka penelitian ini bertujuan:

1. ⁹ Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pelaksanaan anggaran terhadap akuntabilitas kinerja pada Pengadilan Agama Jakarta Utara.
2. ²⁵ Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh evaluasi kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Pengadilan Agama Jakarta Utara.
3. ²⁵ Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pelaksanaan anggaran dan evaluasi anggaran terhadap akuntabilitas kinerja pada Pengadilan Agama Jakarta Utara.

² 1.4 MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambahkan wawasan dan pengetahuan kepada semua pihak mengenai akuntabilitas kinerja.
2. Sebagai bahan informasi dan acuan dalam melihat capaian kinerja yang ada pada Pengadilan Agama Jakarta Utara.

2
3. Penelitian ini dapat digunakan sebagai literatur bagi penulis selanjutnya yang ingin meneliti masalah yang sama dan menjadi referensi bagi semua pihak yang membutuhkannya.

11 1.5 RUANG LINGKUP PENELITIAN

Ruang lingkup yang dilakukan pada penelitian ini hanya sebatas dilakukan di lingkungan Pengadilan Agama Jakarta Utara. Penulis hanya membahas apakah 12 Pengaruh Pelaksanaan Anggaran dan Evaluasi Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Instansi Pengadilan Agama Jakarta Utara.

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

26
Pembahasan dalam penulisan ini disusun dalam lima bab dan dibagi menjadi beberapa sub-sub 1 sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulis.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi deskripsi konseptual, penelitian yang relevan, dan kerangka berfikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi desain penelitian, populasi dan sampel penelitian, definisi operasional variable, teknik pengumpulan data, dan 37 teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian, uji kualitas data, uji asumsi klasik, pengujian hipotesis, uji koefisien determinasi, pembahasan hasil penelitian, implikasi penelitian, dan keterbatasan penelitian.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakuin.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 DESKRIPSI KONSEPTUAL

2.1.1 Anggaran

Anggaran sangat penting bagi suatu organisasi. Untuk organisasi privat atau swasta, anggaran tetap dirahasiakan, sedangkan untuk organisasi sektor publik, anggaran harus diketahui publik untuk dievaluasi, dikritik, dan diberikan masukan untuk meningkatkan kinerja organisasi. Karena reformasi dalam pengelolaan keuangan negara, khususnya sistem perencanaan dan penganggaran, telah banyak terjadi perubahan yang sangat signifikan dalam cara implementasinya.

Anggaran sektor publik membantu menentukan seberapa layak kebutuhan masyarakat seperti listrik, udara, kesehatan, pendidikan, dan lainnya terpenuhi. Keputusan yang dibuat oleh pemerintah melalui anggaran yang mereka buat berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Anggaran berfungsi sebagai peta jalan untuk masa depan negara. Anggaran juga merupakan perekonomian terpenting yang dimiliki pemerintah untuk mengarahkan kemajuan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat (Nurhidayah, 2020). Oleh karena itu, anggaran merupakan alat utama untuk kebijakan fiskal pemerintah.

Proses reformasi penganggaran dimulai dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional. Selain

itu, pada tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga menetapkan persyaratan yang lebih rinci tentang penganggaran. Peraturan tersebut menetapkan bahwa penganggaran berbasis kinerja harus diterapkan dan didukung oleh standar anggaran terpadu (Biswan & Grafitanti, 2021).

BPKP (2011) menyatakan bahwa aktivitas atau upaya yang dilakukan untuk mencapai rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan disebut pelaksanaan anggaran. Pengaturan penggunaan alat-alat yang diperlukan, siapa yang melakukannya, bagaimana dan kapan melakukannya adalah bagian dari proses pelaksanaan. Berdasarkan pemahaman ini, pelaksanaan anggaran didefinisikan sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan anggaran yang telah dibuat. Ini mencakup masalah internal seperti kurangnya surat keputusan dari pengelola keuangan, kurangnya kompensasi dan hukuman, dan kebiasaan menunda pekerjaan (Ferdinan et al., 2020).

Menurut Harriyanto, dalam pelaksanaan anggaran, ada beberapa faktor yang mempengaruhi lambatnya penyerapan anggaran. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan di dalam satuan kerja.
2. Proses pengadaan barang dan jasa.
3. Mekanisme pembayaran (pencairan anggaran) (Harahap et al., 2020).

43

2.1.2 Konsep Anggaran Berbasis Kinerja

47

Setiap dana yang dialokasikan untuk setiap layanan publik yang dilakukan harus memiliki indikator kinerja yang jelas, menurut definisi Mahmudi: "Anggaran berbasis kinerja merupakan sistem penganggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara anggaran (input) dengan keluaran (output) dan hasil (outcome) yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut." Hal-hal yang perlu diperhatikan saat menggunakan anggaran berbasis kinerja adalah prinsip-prinsip berikut: transparansi dan akuntabilitas anggaran, disiplin anggaran, keadilan anggaran, efisiensi dan efektivitas, dan dikemas dengan pendekatan kinerja (Anggraeni & Saleh, 2020).

49

Anggaran berbasis kinerja adalah penganggaran yang memperhatikan hubungan antara pendanaan dan kinerja yang diharapkan. Pendekatan ini membuat kinerja lembaga pemerintah lebih jelas dan lebih mudah untuk mengukur hasil atau manfaatnya, karena pendekatan ini menuntut agar tujuan dan sasaran program atau kegiatan pemerintah sesuai dan jelas. Selain itu, sistem penganggaran berbasis kinerja pelaporan kinerja pemerintah baik dari segi pencapaian target kinerja maupun keuangannya. Dengan demikian, anggaran berbasis kinerja yang diharapkan dapat digunakan secara efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah atas kinerjanya (Anggraeni & Saleh, 2020)

60

Pendekatan anggaran berbasis kinerja dimaksudkan untuk mengatasi berbagai kekurangan anggaran tradisional, terutama kekurangan tolak ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik. Pendekatan kinerja dalam anggaran sangat menekankan ide tentang nilai uang dan pengawasan atas kinerja output. Pendekatan ini juga mengutamakan metode untuk

16

menetapkan dan menjadikan prioritas tujuan serta pendekatan rasional dan sistematis dalam proses pengambilan keputusan (Selviani, 2021).

2.1.3 Evaluasi Kinerja

Menurut Payaman J. Simanjuntak, evaluasi adalah “ suatu metode dan proses penilaian pelaksanaan tugas (kinerja) seseorang atau sekelompok orang atau unit-unit kerja dalam satu perusahaan atau organisasi sesuai dengan standar kinerja atau tujuan yang ditetapkan lebih dahulu”. Dengan demikian, evaluasi kinerja adalah proses yang digunakan oleh kepala untuk menerangi seberapa baik seorang karyawan melakukan pekerjaannya.

Berdasarkan pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa evaluasi kinerja adalah penilaian yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui hasil pekerjaan karyawan dan kinerja organisasi. Ini juga membantu menentukan kebutuhan pelatihan kerja, memberikan tanggung jawab yang tepat kepada karyawan sehingga mereka dapat melakukan pekerjaan yang lebih baik di masa mendatang, dan berfungsi sebagai dasar untuk menetapkan kebijakan tentang promosi atau penentuan imbalan.

Menurut Society for Human Resource Management, evaluasi kinerja adalah “proses berlangsung sejauh mana kinerja karyawan dalam bekerja ketika dibandingkan dengan serangkaian standar, dan mengkomunikasikan informasi tersebut pada karyawan”. Berdasarkan definisi di atas, evaluasi kinerja merupakan proses untuk menilai seberapa baik kinerja aparatur bila dibandingkan dengan standar yang diberikan oleh pimpinan. Hal ini juga dilakukan untuk menilai seberapa baik aparatur bekerja setelah menerima informasi dan berkomunikasi dengan aparatur lainnya agar pekerjaan sesuai dengan keinginan pimpinan dan kinerja aparatur.

Menurut Wirawan (2009), tujuan evaluasi kinerja adalah sebagai berikut:

1. Memberikan umpan balik kepada aparatur ternilai tentang bagaimana mereka bekerja. Ketika memastikan atau menilai pegawai, aparatur harus bahwa mereka melakukan pekerjaan yang diberikan kepada mereka sesuai dengan deskripsi tugas, prosedur operasi, dan standar kinerja .
2. Alat promosi dan demosi: Dalam hampir semua kinerja sistem evaluasi , hasil evaluasi digunakan untuk memutuskan siapa yang bernilai untuk dipromosikan jika kinerjanya memenuhi persyaratan untuk promosi. Aparatur ternilai dapat dipromosikan dengan kenaikan gaji, bonus atau komisi, kenaikan pangkat, atau jabatan tertentu . Sebaliknya, jika kinerja mereka buruk atau di bawah standar, organisasi menggunakan hasil sebagai dasar untuk menurunkan gaji, pangkat, atau jabatan staf ternilai.
3. Alat evaluasi kinerja ternilai. Evaluasi kinerja yang memenuhi standar, sangat baik, atau lebih baik dapat digunakan untuk mendorong kinerja karyawan. Hasil evaluasi dapat digunakan organisasi untuk mendorong staf untuk meningkatkan kinerja yang baik atau sedang dan mempertahankan kinerja yang unggul.
4. Penentuan dan pengukuaran tujuan kinerja: Dengan menggunakan prinsip manajemen berdasarkan tujuan, sistem evaluasi kinerja dimulai dengan menentukan target kerja aparatur yang paling penting pada awal tahun.
5. Konseling kinerja buruk. Menurut evaluasi kinerja, beberapa perangkat tidak memenuhi standar kinerja atau beroperasi dengan buruk. Ini bisa karena ia memiliki masalah pribadi atau tidak berusaha menyelesaikan pekerjaannya

dengan baik. Untuk aparatur seperti ini, penilai akan memberikan nasihat tentang alasan mengapa kinerja mereka kurang dinilai dan berusaha untuk meningkatkan kinerja mereka di tahun mendatang. Jika atasan mengetahui kelemahan staf, penyeliaan dapat dilakukan sebelum evaluasi kinerja.

6. Staf Pemberdayaan . Evaluasi kinerja menentukan apakah kinerja seorang karyawan dapat digunakan untuk meningkatkan keberlanjutan.

Aspek-aspek yang dinilai dalam evaluasi kinerja adalah sebagai berikut :

1. Kemampuan Teknis

Kemampuan teknis merupakan kemampuan menggunakan pengetahuan, teknik, metode dan peralatan yang dipergunakan untuk melaksanakan tugas serta pengalaman dan pelatihan yang diperoleh.

2. Kemampuan Konseptual

Kemampuan konseptual merupakan kemampuan untuk memahami kerumitan perusahaan dan penyesuaian bidang gerak dari unit masing-masing kedalam bidang operasional secara menyeluruh, pada intinya individual tersebut memahami tugas, fungsi dan tanggung jawabnya sebagai seorang karyawan.

3. Kemampuan Hubungan Interpersonal

Kemampuan hubungan interpersonal memiliki fungsi untuk bekerja sama dengan orang lain, melakukan negosiasi, memotivasi karyawan dan lain-lain.

2.1.4 Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas merupakan kunci dari terwujudnya prinsip good governance dalam pengelolaan organisasi sektor publik. Bastian mengemukakan bahwa akuntabilitas kinerja tercantum dalam dasar hukum atau aturan organisasi sektor publik. Akuntabilitas suatu organisasi harus di penuhi atas kinerjanya secara efektif dan efisien dalam konteks hukum (Susliyanti & Binawati, 2020). Selanjutnya Ledvina dkk mengemukakan bahwa akuntabilitas kinerja merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang petugas baik masih berada pada wewenangnya maupun berada diluar tanggungjawab dan kewenangan.

Akuntabilitas kinerja menurut Darwanis dan Chairunnisa merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kegagalan atau keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang telah diamanatkan para kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara teratur (Provinsi et al., 2020). Oleh sebab itu suatu instansi pemerintah dituntut untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya, agar akuntabilitas efektif dan efisien.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 pasal 20 bahwa sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) dihasilkan dari masing-masing entitas pelapor dan akuntansi yang telah diselenggarakan oleh SAKIP. SAKIP dikembangkan secara integritas dengan sistem perencanaan, pembendaharaan, dan sistem akuntansi pemerintah. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 menjelaskan akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai target dan tujuan yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban yang dilakukan secara teratur. Misi ini

merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar tujuan organisasi terlaksana dengan efektif dan efisien.

Menurut Wahyudi, sistem akuntabilitas instansi pemerintah merupakan rangkaian proses yang sistematis dari berbagai komponen, alat dan prosedur yang dibangun untuk mencapai tujuan manajemen kinerja, yaitu perencanaan, pengukuran dan penetapan kinerja, pengumpulan data, pengklasifikasian, dan pelaporan ² kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah (Sitti, 2020). Instansi pemerintah bagian lembaga negara di pusat maupun daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya, karena akuntabilitas yang diminta meliputi keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan dan melaporkannya secara periodik.

Tujuan dan sasaran dari akuntabilitas kinerja untuk mendorong tercapainya akuntabilitas kinerja sebagai salah satu persyaratan dalam mencapai pemerintahan yang baik dan terpercaya. Berikut tujuan dan sasaran dari sistem akuntabilitas kinerja yaitu : terwujudnya transparansi instansi pemerintah, terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional, terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan menjadi instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi dengan efektif, efisien dan responsif terhadap keinginan masyarakat (Susliyanti & Binawati, 2020).

2.1.5 Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas publik menurut Bastian merupakan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban untuk menjawab, menerangkan kinerja, dan tindakan seseorang kepada pihak yang memiliki hak atau kewajiban untuk meminta

keterangan atau pertanggungjawaban. Selanjutnya Yunita dkk mengemukakan bahwa, akuntabilitas publik merupakan kewajiban pemegang kepercayaan untuk memberikan pertanggungjawaban, mengungkapkan, dan menyajikan semua kegiatan dan kegiatannya yang merupakan tanggungjawaban kepada prinsip yang memiliki hak dan kewajiban untuk menerima pertanggungjawaban.

Menurut Setiana dan Yuliani, Akuntabilitas diartikan sebagai tanggung jawab amanah / agen/kepala desa beserta aparaturnya untuk memberikan pertanggungjawaban, serta melaporkan, mempersiapkan, dan melaksanakan secara penuh seluruh kegiatan dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. pertanggungjawaban kepada pihak amanah (prinsipal) yang mempunyai wewenang dan motivasi untuk melaksanakan pertanggungjawaban tersebut di atas (Lilis Saidah Napisah & Cecep Taufiqurachman, 2020). Menurut Jatmiko, akuntabilitas publik mengacu pada kewajiban seorang agen untuk menyampaikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala kegiatan dan aktivitas yang diwajibkan kepada masyarakat, yang memiliki hak dan kewenangan untuk menuntut pertanggungjawaban tersebut.

Menurut Program Pembangunan PBB, ada dua prinsip akuntabilitas, menurut Yunita dan Chirtianingrum (2018:101) :

1. Transparansi, yang berkaitan dengan bagaimana organisasi dapat mengungkapkan fakta tentang kinerjanya.
2. Kewajiban, yang berkaitan dengan bagaimana organisasi menangani akibat dari kinerjanya.
3. Dapat dikendalikan berarti menyelesaikan tugas yang telah diberikan.

4. Tanggung jawab berarti bertanggung jawab atas standar kinerja saat ini.
5. Tanggapan berarti organisasi harus memenuhi harapan nyata pemangku kepentingan.

65

2.1.6 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Akuntabilitas **kinerja instansi** pemerintah **adalah** kewenangan suatu **instansi** pemerintah **untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik**, menurut Keputusan Kepala LAN No.239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Menurut Elwood (1993) dalam Mahmudi (2010:9), ada beberapa dimensi akuntabilitas publik yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik. Ini meliputi akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan, dan akuntabilitas finansial (Anggraeni & Saleh, 2020).

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau jawaban dan menerangkan **kinerja dan tindakan** seseorang, **badan** hukum, atau **pimpinan organisasi** kepada **pihak yang** memiliki **hak** atau kewenangan untuk meminta keterangan pertanggungjawaban atau pencapaian akuntabilitas. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah harus didukung oleh peraturan perundang -undangan yang jelas (Sulfianty & Baku, 2021).

Mardiasmo (2009) mendefinisikan akuntabilitas sebagai penyebaran informasi tentang kinerja keuangan pemerintah kepada kelompok yang mendesak, menurut Halim & Kusufi (2014:16). Dalam hal ini, Halim (2012:20) mendefinisikan

akuntabilitas sebagai kewajiban untuk membagikan informasi yang menjelaskan kinerja sekaligus aktivitas pegawai.

2.2 PENELITIAN YANG RELEVAN

Penelitian yang relevan menjadi acuan penulis dalam melakukan penelitian, sehingga penulis dapat mengembangkan teori yang digunakan dalam melakukan penelitian. Dilihat dari beberapa penelitian terdahulu, penulis mendapatkan beberapa penelitian yang akan menjadi acuan sebagai bahan penelitian sekarang, diantaranya :

Tabel 2.1 Penelitian yang Relevan

NO	Judul, Penulis dan Metode	Tujuan	Masalah	Hasil Penelitian
1.	Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung)	bertujuan untuk menentukan bagaimana penerapan anggaran berbasis kinerja dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung, serta untuk menganalisis pengaruhnya	Penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kota Bandung. Besarnya pengaruh tersebut adalah 61,7% dan	Hasilnya menunjukkan bahwa implementasi anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja dari lembaga pemerintah.

	<i>Ferina Anggraeni, Suji Abdullah Saleh 2021 Metode kuantitatif</i>	penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.	sisanya 38,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.	
2.	Pengaruh Perencanaan Dan Anggaran Berkas Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja (Survei Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bandung) <i>Inta Budi Setyanusa,</i>	Bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Perencanaan terhadap Akuntabilitas Kinerja. Dan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Anggaran Berkas Kinerja terhadap Akuntabilitas kinerja.	Terdapat Perencanaan masih belum mencapai target, maka dari itu masih perlu banyak perbaikan serta masih ada kekeliruan dari aparatur pemerintah bahwa keberhasilan dan kegagalan program dan kegiatan yang dilaksanakan hanya berdasarkan penyerapan anggaran berbasis kinerja	Hasil penelitian ini menunjukkan baha Perencanaan dan Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bandung.

	<i>Ummi Ghoidah Mutmainnah 2022 Metode kuantitatif</i>		menyebabkan hasil dari evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah masih menempati peringkat terendah	
3.	PELAKSANAAN ANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POHUWATO <i>Sulfianty, Agus Baku 2021 Metode kuantitatif</i>	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh pelaksanaan anggaran dan evaluasi kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah di Kabupaten Pohuwato.	Pelaksanaan anggaran berpengaruh positif dan namun tidak signifikan terhadap Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.	Evaluasi kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diterima. Pelaksanaan anggaran dan evaluasi kinerja secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas

				Kinerja Instansi Pemerintah
4.	PENGARUH ANGGARAN BERBASIS KINERJA DAN KEJELASAN SASARAN ANGGARAN TERHADAP AKUNTABILIT AS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) PROVINSI LAMPUNG <i>Nur Desiana Wardani</i>	Untuk mengetahui pengaruh Pelaksanaan Anggaran Berbasis dan Kejelasan Tujuan Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Lampung secara simultan dan parsial.	Akuntabilitas pemerintah yang masih belum transparan, kurang akuntabel, berkinerja buruk serta belum efektif dan efisien.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan kinerja berbasis anggaran dan kejelasan tujuan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan nilai F hitung sebesar 15.603> Ftabel 3,240 dan nilai signifikansi yang lebih kecil sebesar 0,000

	<i>Dewi Silvia</i> <i>2021</i> <i>Metode</i> <i>kuantitatif</i>			
5.	Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Polda Papua) <i>Dadan Ginanjar, Fachruddin Pasolo, Adolf Siahay, Kasim Saleh</i> <i>2019</i> <i>Metode</i> <i>kuantitatif</i>	bertujuan untuk mencari bukti empirik apakah penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan menggunakan empat	Pelaksanaan anggaran memiliki hubungan positif dan signifikan dengan akuntabilitas kinerja pemerintah. Evaluasi kinerja memiliki hubungan positif dan signifikan dengan akuntabilitas kinerja pemerintah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan anggaran memiliki hubungan positif dan tidak signifikan dengan akuntabilitas kinerja pemerintahan, pelaksanaan anggaran memiliki hubungan positif dan signifikan dengan akuntabilitas kinerja pemerintahan ,

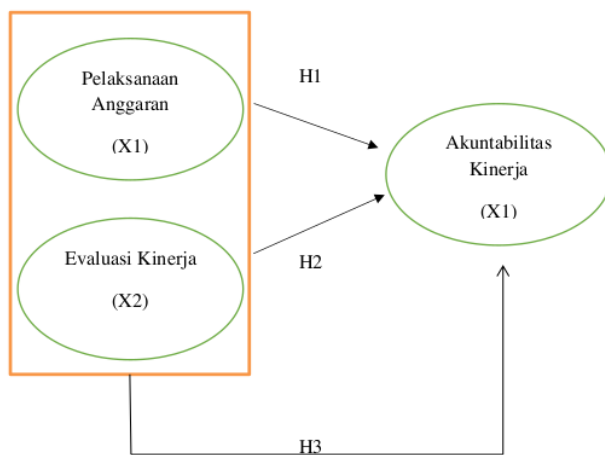
		variabel yaitu, perencanaan anggaran (X1), pelaksanaan anggaran (X2), pelaporan/pertanggung jawab anggaran (X3), dan evaluasi kinerja (X4).		pelaporan/pertanggung jawab anggaran memiliki hubungan negatif dan tidak signifikan dengan akuntabilitas kinerja pemerintahan dan evaluasi kinerja memiliki hubungan positif dan signifikan dengan akuntabilitas kinerja pemerintahan.
--	--	--	--	---

2.3 KERANGKA BERPIKIR

Kerangka berpikir merupakan dasar penelitian dari peneliti yang berupa fakta-fakta. Oleh sebab itu kerangka berpikir memuat teori, dalil dan konsep-konsep yang akan dijadikan dasar dalam penelitian. Variabel-variabel dalam kerangka berpikir dijelaskan secara relevan dengan permasalahan yang akan diteliti, sehingga dapat dijadikan dasar untuk menjawab permasalahan penelitian. Kerangka berpikir dapat disajikan dalam bentuk bagan yang menunjukkan alur pikir penelitian serta keterkaitan

antara variabel yang dipilih, yang bisa disebut model peneliti (Syahputri et al., 2023). Berdasarkan penelitian yang berjudul “PENGARUH PELAKSANAAN ANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA PADA PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA.

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



2.4 HIPOTESIS

Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya, hipotesis yang telah mendasari karya ilmiah ini adalah :

H1 : Diduga bahwa pelaksanaan anggaran secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

H2 : Diduga bahwa evaluasi kinerja secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

H3 : Diduga bahwa pelaksanaan anggaran dan evaluasi kinerja secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 DESAIN PENELITIAN

3.1.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, Karena data yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan dalam bentuk angka, untuk menghasilkan hasil yang dapat digeneralisasi melintasi waktu, tempat, dan situasi. Salah satu tujuan dari metode penelitian kuantitatif ini adalah untuk mengembangkan model matematis, teori, dan hipotesis yang berkaitan dengan fenomena tertentu, dengan tujuan untuk menentukan bagaimana hubungan antar populasi variabel. Proses pengukuran menunjukkan hubungan dasar antara observasi empiris dan hubungan kuantitatif matematis (Balaka, 2022).

Pendekatan kuantitatif ini akan menguji teori dengan melakukan analisis dan interpretasi data statistik sebelum penelitian. Dengan menjelaskan hipotesis tertentu dan mengumpulkan data untuk mendukung atau menentang hipotesis tersebut. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan analisis kuantitatif berdasarkan informasi statistika. Untuk menjawab masalah penelitian, variabel-variabel yang diteliti harus diukur dengan cermat. Ini akan menghasilkan kesimpulan yang dapat digeneralisasikan dalam konteks waktu, tempat, dan situasi.

3.1.2 Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Jakarta Utara yang terletak di Jl. Plumpang Semper No.5, Tugu Sel., Kec. Koja, Jkt Utara, Daerah

Khusus Ibukota Jakarta 14260. Peneliti melakukan riset yang dilaksanakan selama 2 bulan pada bulan April-Mei 2024.

29

3.2 POPULASI DAN SAMPEL

3.2.1 Populasi

Dalam sebuah penelitian, populasi menggambarkan kumpulan data yang sangat besar dan luas, dan populasi juga merupakan kumpulan dari semua orang, benda, dan ukuran lain yang mungkin menjadi subjek penelitian (Purwanza et al., 2022). Jumlah populasi yang ada didalam penelitian ini sebanyak 60 pegawai.

3.2.1 Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi. Peneliti menentukan sampel berdasarkan berbagai faktor, seperti masalah yang dihadapi penelitian, tujuan penelitian, hipotesis yang dibuat, metode penelitian, dan instrumen penelitian (Purwanza et al., 2022). Dalam penelitian ini menggunakan teknik total sampling, karena jumlah populasi yang relatif kecil yaitu kurang dari 100, sehingga sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 60 orang.

3.3 DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL

3.3.1 Pelaksanaan Anggaran (X1)

IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) merupakan indikator kualitas pelaksanaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang dapat digunakan untuk menerangi seberapa baik pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh kementerian negara atau lembaga. IKPA adalah indikator untuk mengukur : Anggaran yang digunakan oleh Kementerian Negara/Lembaga dalam hal perencanaan, efisiensi, dan kepatuhan terhadap peraturan (Buana & Widiatmoko, 2019). Kepatuhan terhadap peraturan-undangan dan total aset berdampak positif pada tingkat pengungkapan

laporan keuangan (Rahmasari, 2017). Anggaran dilaksanakan sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran, penerimaan berupa kas disetorkan dalam satuan hari kerja, pembayaran belanja anggaran dilakukan sesuai dengan surat penyediaan dana, pemindah bukuan rekening cadangan sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan apabila pelaksanaan anggaran berjalan dengan baik.

3.3.2 Evaluasi Kinerja (X2)

Menurut Ashari (2013:34), beberapa indikator evaluasi kinerja adalah sebagai berikut: Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, evaluasi terhadap ekonomi, apakah sesuai dengan target yang ditetapkan, adanya reward yang diberikan kepada SKPD yang mencapai target anggaran, evaluasi terhadap efisiensi, apakah sesuai target yang ditetapkan, evaluasi terhadap efektivitas apakah telah sesuai dengan target yang ditetapkan.

3.3.3 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah membuat pemerintah bertanggung jawab kepada publik atas keberhasilan atau kegagalan mereka dalam memenuhi tujuan mereka. Pemerintah daerah (Studi Kasus Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Berau) ⁷ dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban yang digunakan secara berkala. Adapun indikator akuntabilitas instansi pemerintah adalah sebagai berikut : LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) menyajikan tingkat pencapaian sasaran dan target kinerja, adanya keterkaitan yang erat antara pencapaian kinerja dengan program dan kebijakan, kejelasan sasaran anggaran suatu program harus dimengerti oleh semua aparat dan pemimpin. LAKIP disusun dengan menjabarkan

visi, misi, hasil, dan manfaat, LAKIP disajikan dengan jujur, objektif, transparan, dan akurat, dan menyajikan tingkat keberhasilan program dan kegiatan (Darwanis, 2013).

51

3.4 TEKNIK PENGUMPULAN DATA

3.4.1 Observasi

Pengumpulan data melalui pengamatan dan catatan tentang keadaan atau perilaku objek sasaran dikenal sebagai metode observasi. Metode observasi dapat didefinisikan sebagai metode pengambilan data yang dilakukan secara langsung melalui pengamatan situasi atau kejadian di lapangan. Jenis observasi yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Observasi non-partisipasi, artinya penulis tidak terlibat atau terlihat langsung dalam kegiatan orang yang diobservasi.
- b. Observasi yang berstruktur, yang berarti penulis menggunakan pedoman yang telah disiapkan sebelumnya sebelum melakukan observasi (Hasibuan et al., 2023).

3.4.2 Kuesioner

Kuesioner adalah suatu metode pengumpulan data atau informasi melalui formulir-formulir yang berisi pernyataan yang diisi oleh beberapa orang untuk mendapatkan tanggapan atau jawaban yang dapat dianalisis oleh pihak yang memiliki tujuan tertentu. Kuesioner juga sangat populer untuk melakukan penilaian terhadap barang atau jasa yang beroperasi (Cahyo et al., 2019). Berikut alternatif jawaban kuesioner dalam analisis ini menggunakan skala likert merujuk merujuk pada penggunaan format pernyataan dengan menggunakan skala likert dalam kuesioner, yaitu :

Tabel III.1 Skala Likert

Jawaban	Skor
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Netral (N)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

3.5 TEKNIK ANALISIS DATA

3.5.1 Uji Kualitas Data

A. Uji Validitas

Uji validitas menentukan seberapa Andal dan sah alat ukur yang digunakan. Uji validitas adalah proses menguji isi atau isi instrumen untuk mengetahui seberapa tepat instrumen tersebut digunakan dalam penelitian (Arsi, 2021). Dalam penelitian ini, uji validitas akan dilakukan menggunakan software SPSS v25, instrumen penelitian akan dinilai valid berdasarkan kriteria, yaitu :

1. Apabila nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka instrumen tersebut dinyatakan valid.
2. Apabila nilai $r_{hitung} < r_{tabel}$, maka instrumen tersebut dinyatakan tidak valid.

B. Uji Reliabilitas

Uji reabilitas adalah alat yang digunakan dalam penelitian untuk mendapatkan informasi yang dapat dipercaya sebagai alat pengumpulan data dan memiliki

kemampuan untuk mengungkap informasi nyata di lapangan (Arsi, 2021). Pengujian reabilitas ini bermanfaat untuk mengukur konsistensi atau stabilitas respon jawaban terhadap pernyataan atau indeks variabel. Kriteria suatu instrumen penelitian dapat dikatakan reliabel dilihat dari *Cronbach's Alpha*, yaitu :

8

1. Apabila nilai *Cronbach's Alpha* $> 0,60$ maka dinyatakan data tersebut reliabel.
2. Apabila nilai *Cronbach's Alpha* $< 0,60$ maka dinyatakan data tersebut tidak reliabel.

55

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

A. Uji Normalitas

Uji **normalitas** digunakan untuk memastikan bahwa sampel diambil dari populasi dengan distribusi normal atau tidak. Rumus *Kolmogrov-Smirnov* digunakan untuk menghitung uji normalitas. Menurut kriteria yang digunakan, distribusi frekuensi normal jika hasil $p > 0.05$ dan tidak normal jika hasil $p < 0.05$ (Yulianto et al., 2022).

20

B. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menentukan apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan dalam variasi residu antara pengamatan. Jika variasi sisa antara pengamatan tetap, jadi disebut homoskedastisitas, dan jika tidak sama maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak ada heteroskedastisitas. Oleh sebab itu peneliti menguji heteroskedastisitas dengan metode glejser. Metode ini melibatkan pengukuran variabel independen dengan residualnya, dengan tingkat signifikan 0,05 dan uji dua sisi. Jika ada

4

signifikansi lebih dari 0,05 dalam korelasi antara variabel independen dan residual, maka tidak ada masalah heteroskedastisitas (Christine et al., 2019).

⁴ C. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi menemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Dalam model regresi yang baik, variabel independen tidak seharusnya memiliki korelasi. Pengujian multikolinearitas dimaksudkan untuk menganalisis terjadinya multikolinearitas pada suatu model regresi yang dilihat dari nilai *Varian Inflation Factor* (VIF) dan nilai *tolerance* (Christine et al., 2019). Kriteria suatu model regresi dinyatakan bebas dari multikolinearitas adalah sebagai berikut :

- ¹⁷ 1. Apabila nilai $VIF < 10$ dan nilai *tolerance* $> 0,10$ maka model regresi terbatas dari multikolinearitas dan model regresi tersebut dapat dikatakan baik.
- ¹⁷ 2. Apabila nilai $VIF > 10$ dan nilai *tolerance* $< 0,10$ maka model regresi terbatas dari multikolinearitas dan model regresi tersebut dapat dikatakan tidak baik.

⁴ D. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh dan arah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen; Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk mengetahui apakah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen memiliki arah yang positif atau negatif.

3.5.3 Uji Hipotesis

A. Uji Parsial T

Uji parsial t merupakan pengujian koefisien regresi parsial individual untuk menentukan apakah variabel independen (X_1 , X_2) mempengaruhi variabel dependen (Y) secara parsial (Simanjuntan & Sitio, 2021). Kriteria pengambilan keputusan uji parsial t, yaitu :

1. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka variabel independen yang ditentukan berpengaruh terhadap variabel dependen dengan tingkat probabilitas sebesar 0,05.
2. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, tetapi variabel independen yang digunakan tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dengan tingkat probabilitas sebesar 0,05.

Kriteria pengambilan keputusan dengan melihat nilai signifikansi, yaitu :

1. Jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

B. Uji Stimulan F

Uji stimulan f digunakan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen (X_1 dan X_2) terhadap variabel terikat (Y), uji F melihat semua variabel bebas dibandingkan dengan variabel terikat (Simanjuntan & Sitio, 2021). Keputusan uji stimulan f dapat diambil berdasarkan kriteria sebagai berikut, yaitu :

1. Variabel bebas yang diuji berpengaruh secara stimulan terhadap variabel terikat jika nilai F hitung $>$ dari nilai F tabel dengan tingkat probabilitas sebesar 0,05.

2. Variabel independen yang diuji tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen jika nilai F hitung < dari nilai F tabel dengan tingkat probabilitas sebesar 0,05.

Kriteria pengambilan keputusan dengan melihat nilai signifikansi, yaitu :

- 4
1. Jika nilai signifikansi < 0,05 maka variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai signifikansi > 0,05 maka variabel independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

3.5.4 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi adalah ukuran seberapa jauh kemampuan model untuk menjelaskan variasi variabel dependen. Ini dapat dihitung dengan mengkuadratkan koefisien korelasi atau koefisien kuadrat R (R^2) (Reza Nurul Ichsan, Ahmad Karim, 2021).

1. Apabila nilai koefisien determinasi berada dalam rentang angka (0) artinya variabel dependen terbatas
2. Apabila nilai koefisien determinasi berada dalam rentang angka (1) artinya variabel dependen sempurna.

Adapun rumus yang digunakan dalam koefisien determinasi, sebagai berikut :

$$KD = r^2 \times 100\%$$

Keterangan :

KD = Koefisien Determinasi

r^2 = Koefisien antara ¹X dan Y

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 HASIL PENELITIAN

4.1.1 Karakteristik Responden

Peneliti mengambil sampel dengan menggunakan teknik sampel jenuh yaitu total seluruh populasi dijadikan sampel dalam penelitian. Berikut adalah data yang dilakukan pada 60 responden yang didapatkan penelitian di Pengadilan Agama Jakarta Utara menggunakan kuesioner. Dengan data karakteristik responden sebagai berikut:

1. Usia Responden

Berikut dibawah ini adalah tabel usia dari responden :

Tabel IV.1

Usia responden

Usia	Frekuensi	Presentase (%)
25 – 30 Tahun	34	56,7%
31 – 40 Tahun	13	21,7%
41 – 50 Tahun	8	13,3%
51 – 60 Tahun	5	8,3%
Total	60	100%

Berdasarkan tabel diatas bahwa responden yang berusia 25 – 30 tahun berjumlah paling banyak yaitu 34 responden dengan jumlah persentase 56,7%, selanjutnya usia 31 – 40 tahun berjumlah 13 responden dengan jumlah persentase

21,7%, selanjutnya usia 41 – 50 tahun berjumlah 8 responden dengan jumlah persentase 13,3%, dan yang terakhir dengan jumlah paling sedikit berada pada usia 51 – 60 tahun berjumlah 5 responden dengan jumlah persentase 8,3%

2. Jenis Kelamin Responden

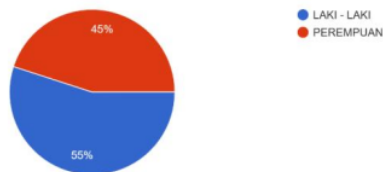
Berikut adalah data jenis kelamin responden dapat dilihat dibawah tabel ini :

Tabel IV.2

Jenis kelamin responden

Jenis kelamin	Jumlah responden	Persentase
Laki - laki	33	55%
Perempuan	27	45%
Total	60	100%

JENIS KELAMIN
60 jawaban



Gambar IV.1

Berdasarkan diagram yang tertera bahwa jenis kelamin responden yang berdominan yaitu Laki – Laki dengan berjumlah 33 responden yang memiliki

persentase 55%, sedangkan untuk responden perempuan yaitu berjumlah 27 responden yang memiliki persentase 45%.

4.1.2 Deskripsi Data Penelitian

Deskripsi data merupakan acuan dasar dari data yang diambil pada penelitian. Data diperoleh dari hasil kuesioner yang disebarkan kepada pegawai Pengadilan Agama Jakarta Utara sesuai jumlah sampel penelitian. Sampel pada penelitian ini berjumlah 60 responden. Responden akan diberikan pernyataan sebanyak 13 pernyataan yang terbagi atas 3 variabel, variabel X1 sebanyak 5 pernyataan, variabel X2 sebanyak 4 pernyataan, dan variabel Y sebanyak 4 pernyataan. Jawaban responden menggunakan skala likert 1 – 5, berikut merupakan tingkatan dari skala likert : 5 (sangat setuju), 4 (setuju), 3 (netral), 2 (tidak setuju), dan 1 (sangat tidak setuju).

42 4.2 UJI KUALITAS DATA

4.2.1 Uji Validitas

Uji **validitas data** dimaksudkan untuk mengetahui valid atau tidaknya setiap instrumen yang digunakan sebagai alat penelitian. Jika nilai diatas $> 0,312$ maka sebuah pernyataan valid, apabila kurang dari $< 0,312$ maka dapat dinyatakan tidak valid. Berikut merupakan hasil uji validitas dari kuesioner tiap variabel :

Hasil uji validitas X1

No	Pernyataan	Total Correlation	r tabel	Keterangan
1	Anggaran yang digunakan oleh Kementerian Negara/Lembaga dalam hal perencanaan, efisiensi,	,651''	0,312	Valid

	dan kepatuhan terhadap peraturan			
2	Anggaran dilaksanakan sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran	.660''	0,312	Valid
3	Pembayaran belanja anggaran dilakukan sesuai dengan surat penyediaan dana	.611''	0,312	Valid
4	Penerimaan berupa kas disetorkan dalam satuan hari kerja	.610''	0,312	Valid
5	Pemindah bukuan rekening cadangan sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan apabila pelaksanaan anggaran berjalan dengan baik.	.618''	0,312	Valid

Sumber :data yang diolah

Berdasarkan hasil tabel diatas dapat disimpulkan bahwa hasil uji validitas kuesioner variabel X1 sebanyak 5 butir pernyataan , semua item pernyataan dinyatakan valid, sehingga variabel X1 layak digunakan sebagai alat penelitian.

Hasil uji validitas X2

No	Pernyataan	Total Correlation	r tabel	Keterangan
1	Adanya evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di PAJU	.701''	0,312	Valid
2	Adanya reward yang diberikan kepada SKPD yang mencapai target anggaran	.660''	0,312	Valid
3	Adanya evaluasi terhadap efisiensi, apakah sesuai target yang ditetapkan	.692''	0,312	Valid
4	Adanya evaluasi terhadap efektivitas apakah telah sesuai dengan target yang ditetapkan.	.647''	0312	Valid

Sumber : data yang diolah

Berdasarkan hasil tabel diatas dapat disimpulkan bahwa hasil uji validitas kuesioner variabel X2 sebanyak 4 butir pernyataan , semua item pernyataan dinyatakan valid, sehingga variabel X2 layak digunakan sebagai alat penelitian.

Hasil uji validitas Y

No	Pernyataan	Total Correlation	r tabel	Keterangan
1	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyajikan	.739''	0,312	Valid

	tingkat pencapaian sasaran dan target kinerja			
2	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disusun dengan menjabarkan visi, misi, hasil, dan manfaat	.688"	0,312	Valid
3	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disajikan dengan jujur, objektif, transparan, dan akurat	.655"	0,312	Valid
4	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyajikan tingkat keberhasilan program dan kegiatan	.644"	0,312	Valid

Sumber : data yang diolah

Berdasarkan hasil tabel diatas dapat disimpulkan bahwa hasil uji validitas kuesioner variabel Y sebanyak 4 butir pernyataan, semua item pernyataan dinyatakan valid, sehingga variabel Y layak digunakan sebagai alat penelitian.

4.2.2 Uji Reliabilitas

Uji realibilitas dilakukan untuk menguji kehandalan instrumen yang digunakan dalam penelitian. Nilai dikatakan reliabel apabila ¹¹ nilai *Cronbach's Alpha* > 0,6. Jika

nilai *Cronbach's Alpha* < 0,6 dinyatakan tidak reliabel. Adapun hasil uji reliabilitas dari setiap variabel yang diperoleh sebagai berikut :

Variable	Nilai Cronbach's Alpha	Nilai Standar	Keterangan
Pelaksanaan Anggaran (X1)	0,617	0,6	Reliabel
Evaluasi Kinerja (X2)	0,601	0,6	Reliabel
Akuntabilitas Kinerja (Y)	0,613	0,6	Reliabel

Sumber : data yang diolah

Dari data tabel diatas diketahui bahwa nilai *Cronbach's Alpha* setiap instrumen masing-masing variabel pelaksanaan anggaran (X1), evaluasi kinerja (X2), dan akuntabilitas kinerja (Y) mempunyai nilai > 0,60, hal ini dinyatakan bahwa instrumen nilai dinyatakan reliabel.

4.3 UJI ASUMSI KLASIK

4.3.1 Uji Normalitas

Menurut kriteria yang digunakan, distribusi frekuensi normal jika hasil $p > 0.05$ dan tidak normal jika hasil $p < 0.05$. dibawah ini adalah hasil uji normalitas dengna menggunakan *Kolmogorov-Smirnov*

3 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardize

d Residual

N		60	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	1.94281529	
Most Extreme Differences	Absolute	.087	
	Positive	.087	
	Negative	-.059	
Test Statistic		.087	
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.200 ^d	
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^e Sig.		.314	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.302
		Upper Bound	.326

3 a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

3 e. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.

Berdasarkan dengan uji yang dilakukan diketahui bahwa ³² nilai signifikansi sebesar 0,314 > 0,05, hal ini dinyatakan bahwa distribusi data dinyatakan normal dan layak untuk diuji selanjutnya.

4.3.2 Uji Heterokedastistas

Metode ini melibatkan pengukuran variabel independen dengan residualnya, dengan tingkat signifikan 0,05 dan uji dua sisi. Jika ada signifikansi lebih dari 0,05 dalam korelasi antara variabel independen dan residual, maka tidak ada masalah heteroskedastisitas. Dengan menggunakan uji glasjer maka dibawah ini adalah hasil dari uji heterokedastistas :

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.613	1.441	2.508	.015
	x1	-.117	.062	-.246	.063
	x2	.007	.076	.012	.928

a. Dependent Variable: Abs_RES

Dapat dilihat pada tabel diatas mengenai heteroskedastistas dimana X1 menghasilkan nilai sig sebesar 0,063 > 0,05 hal ini menyatakan bahwa X1 tidak terdapat gejala heteroskedastistas, dilanjutkan dengan X2 yang memiliki nilai sig sebesar 0,928 > 0,05 maka dinyatakan X2 tidak terdapat gejala heteroskedastistas. Disimpulkan model regresi tidak terdapat gejala heteroskedastistas.

4.3.3 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi menemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). (Christine et al., 2019). Kriteria suatu model regresi dinyatakan bebas dari multikolinearitas adalah sebagai berikut :

1. Apabila nilai $VIF < 10$ dan nilai $tolerance > 0,10$ maka model regresi terbebas dari multikolinearitas dan model regresi tersebut dapat dikatakan baik.
2. Apabila nilai $VIF > 10$ dan nilai $tolerance < 0,10$ maka model regresi terbebas dari multikolinearitas dan model regresi tersebut dapat dikatakan tidak baik.

Dibawah ini merupakan hasil dari uji multikolinieritas yang sudah dilakukan :

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	7.020	2.667		2.632	.011	
	pelaksanaan anggaran	.305	.114	.331	2.667	.010	.981
	evaluasi kinerja	.154	.140	.136	1.096	.278	.981

a. Dependent Variable: akuntabilitas kinerja

Dapat diketahui dari hasil uji diatas bahwa masing-masing variabel memiliki nilai $tolerance$ sebesar $0,961 > 0,10$ dan nilai VIF $1,019 < 10$ maka dinyatakan tidak terdapat gejala multikolinieritas.

4.3.4 Analisis linier berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh dan arah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen; Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk mengetahui apakah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen memiliki arah yang positif atau negatif. Berikut adalah hasil uji linier berganda :

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	7.020	2.667		.011
	pelaksanaan anggaran	.305	.114	.331	.010
	evaluasi kinerja	.154	.140	.136	.278

a. Dependent Variable: akuntabilitas kinerja

Diketahui dari tabel diatas dapat disusun kesimpulan seperti dibawah ini:

$$Y = 7.020 + .305X_1 + .154X_2 + e$$

Didasarkan pada rumus tersebut maka dijabarkan bahwa

1. Pada konstantan bernilai sebesar 7.020 menyatakan bahwa apabila pelaksanaan anggaran (X1) dan evaluasi kinerja (X2) nilainya adalah 0, maka nilai akuntabilitas kinerja Y memiliki nilai 7.020.
2. Koefisien X1 menunjukan nilai ,305 yang jika X1 ditambah sebanyak satu-satu maka Y akan ditambah sebesar ,305

3. Koefisien X2 menyatakan nilai ,154 yang jika X2 ditambah sebesar satu-satu maka Y akan ditambah sebesar ,154.

6

4.4 Uji Hipotesis

4.4.1 Uji T parsial

Uji parsial t merupakan pengujian koefisien regresi parsial individual untuk menentukan apakah variabel independen (X_1, X_2) mempengaruhi variabel dependen (Y) secara parsial. Kriteria pengambilan keputusan uji parsial t , yaitu :

1. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka variabel independen yang ditentukan berpengaruh terhadap variabel dependen dengan tingkat probabilitas sebesar 0,05.
2. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, tetapi variabel independen yang digunakan tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dengan tingkat probabilitas sebesar 0,05.

Dibawah ini adalah hasil dari uji t yang telah dilakukan:

3

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.020	2.667		2.632	.011
	pelaksanaan anggaran	.305	.114	.331	2.667	.010
	evaluasi kinerja	.154	.140	.136	1.096	.278

a. Dependent Variable: akuntabilitas kinerja

Berdasarkan pada tabel diatas maka dinyatakan seperti dibawah ini :

1. Dalam melakukan uji t maka harus dicari terlebih dahulu t tabel, t tabel dalam penelitian ini yaitu $df = n-k = 60-3=57$ menghasilkan t tabel 1,672. Diketahui X1 memiliki nilai $sig\ 0.01 < 0.05$ maka X1 memiliki pengaruh terhadap Y. diikuti nilai t hitung $2,667 > 1,672$ maka H_0 diterima dan H_0 ditolak artinya terdapat korelasi X1 terhadap Y
2. Disisi lain X2 memiliki nilai sig sebesar $0.278 > 0.05$ hal ini dinyatakan bahwa X2 tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap Y. dan t hitung $1.096 < 1,672$ yang artinya H_0 diterima dan H_0 ditolak maka tidak terdapat pengaruh antara variabel X2 dengan Y

4.4.2 Uji F Simultan

Uji stimulan f digunakan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen (X1 dan X2) terhadap variabel terikat (Y), uji F melihat semua variabel bebas dibandingkan dengan variabel terikat. Dibawah ini adalah hasil uji f :

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	36.286	2	18.143	4.644	.014 ^b
	Residual	222.697	57	3.907		
	Total	258.983	59			

a. Dependent Variable: akuntabilitas kinerja

b. Predictors: (Constant), evaluasi kinerja, pelaksanaan anggaran

58

dari hasil uji diatas menyatakan bahwa nilai sig $0.014 < 0.05$ dan F hitung sebesar $4.644 > 3.159$. hal ini memilki arti bahawa secara bersamaan variabel independen memilki pengaruh terhadap variabel dependen.

4.5 Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi adalah ukuran seberapa jauh kemampuan model untuk menjelaskan variasi variabel dependen. Ini dapat dihitung dengan mengkuadratkan koefisien korelasi atau koefisien kuadrat R dibawah ini adalah hasil uji koefisien determinasi :

6

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.374 ^a	.140	.110	1.977

a. Predictors: (Constant), evaluasi kinerja, pelaksanaan anggaran

Diketahui dari tabel diatas bisa ditarik kesimpulan dilihat pada *Adjusted R Square* yang memilki nilai sebesar 0.110. ini menyatakan bahwa X1 dan X2 memilki pengaruh terhadap Y sebesar 11% dan sisanya 89% dipengaruhi oleh variabel lainya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

4.5.1 Koefisien determinasi parsial

Klasifikasi nilai koefisien dinyatakan sangat rendah $0,00 - 0,199$, $0,20 - 0,399$ rendah, $0,400 - 0,599$ sedang, $0,60 - 0,799$ kuat, $0,80 - 1,000$ amat kuat. Berikut adalah hasil

6

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.349 ^a	.122	.107	1.980

a. Predictors: (Constant), pelaksanaan anggaran

uji parisal X1 yang sudah dilaksanakan :

dilihat pada tabel diatas berfokus pada *R Square* yang memiliki nilai 0,122 hal ini menyatakan pengaruh X1 terhadap Y sangat rendah

6 Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.181 ^a	.033	.016	2.078

a. Predictors: (Constant), evaluasi kinerja

Selanjutnya X2 memilki *R Square* senilai 0,033 hal ini menyatakan bahwa pengaruh X2 terhadap Y sangat rendah.

4.5.2 Koefisien determinasi simultan

uji simultan menguji secara bersama-sama agar mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antara variabel X1,X2 terhadap Y. dibawah ini adalah hasil dari uji yang telah dilakukan :

6 Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate

1	.374 ^a	.140	.110	1.977
---	-------------------	------	------	-------

a. Predictors: (Constant), evaluasi kinerja, pelaksanaan anggaran

Bisa dilihat dari tabel diatas yang berfokus dapada *R square* yang memiliki nilai 0.140 maka bisa disimpulkan pengaruh antara variabel X1 dan X2 terhadap Y memilki pengaruh yang sangat rendah.

40

4.6 PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.6.1 Pengaruh Pelaksanaan Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja

Pengaruh X1 pelaksanaan anggaran terhadap Y akuntabilitas kinerja berdasarkan dengan hasil penelitian yang dilakukan, maka diperoleh pada uji t nilai sig 0,01 < 0,05 maka X1 memiliki pengaruh terhadap Y. Diikuti nilai t hitung 2,667 > 1,672. Hal ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ginanjar,dkk (2019) yang menunjukan bahwa Pelaksanaan anggaran memiliki hubungan positif dan signifikan dengan akuntabilitas kinerja pemerintah. Hal ini berarti bahwa kinerja pelaksanaan anggaran yang efektif akan meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah. Dalam pelaksanaan anggaran, pemerintah juga harus mengikuti peraturan dan peraturan untuk mematuhi standar pelaksanaan anggaran dan meningkatkan kinerja akuntabilitas pemerintah.

15

4.6.2 Pengaruh Evaluasi Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja

Pengaruh X2 evaluasi kinerja terhadap Y akuntabilitas kinerja dengan hasil penelitian yang sudah dilakukan bahwa tidak terdapat pengaruh antara variabel X2 terhadap Y, hal ini dibuktikan dengan hasil uji t Dimana nilai sig sebesar 0,278 > 0,05 hal ini dinyatakan bahwa X2 tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap Y, sedangkan t hitung 1,096 < 1,672.

3

19

Evaluasi kinerja tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja disebabkan oleh para pegawai yang mempunyai kemampuan yang rendah dan tidak memiliki upaya-upaya untuk memperbaiki kemampuannya, sehingga membutuhkan dorongan dan motivasi secara langsung dari pimpinannya. Hal tersebut didukung oleh faktor-faktor yang disebutkan oleh Abdurrahman (2019). Adapun faktor-faktor dari evaluasi kinerja antara lain : Faktor internal, yaitu faktor yang dihubungkan dengan sifat-sifat seseorang. Faktor eksternal yaitu factor-faktor yang mempengaruhi kinerja seseorang yang berasal dari lingkungan.

12 4.6.3 Pengaruh Pelaksanaan Anggaran dan Evaluasi Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja

Pengaruh X1 dan X2 terhadap Y dalam penelitian ini telah usai, Dimana hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa semua variabel-variabel X1 dan X2 secara bersamaan mempengaruhi Y. dibuktikan dengan hasil uji f yang menghasilkan nilai $\text{sig } 0,014 < 0,05$ dan f hitung sebesar $4,644 > 3,159$. Hal ini memiliki arti bahwa secara bersamaan variabel independent memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.

Seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh Sulfianty (2019) yang menunjukkan bahwa Pelaksanaan anggaran dan evaluasi kinerja secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Nilai F hitung sebesar 34.293 menunjukkan angka positif dengan signifikansi sebesar 0,000 yang lebih besar daripada α sebesar 0,05, sehingga pelaksanaan anggaran dan evaluasi kinerja secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

4.7 IMPLIKASI PENELITIAN

Ada dua aspek dari dampak penelitian yang sudah dilakukan, yaitu implikasi teoritis dan implikasi praktik. Dampak teoritis berdampak pada pendidikan, sedangkan dampak praktik meliputi performa kinerja yang akan datang pada Pengadilan Agama Jakarta Utara. Dibawah ini merupakan implikasi yang didapat setelah dilakukan penelitian :

1. Implikasi teoritis

Setelah dilakukan penelitian ada dampak manfaat untuk dikembangkan pada sektor sumber daya manusia yang berfokus pada kinerja pegawai. Sebagai awal memulai penelitian, peneliti menerapkan sebuah teori-teori yang diajarkan pada saat belajar dikelas seperti halnya yang terhubung tentang pelaksanaan anggaran dan evaluasi kinerja terhadap akuntabilitas kinerja. Selanjutnya dari hasil penelitian bahwa pelaksanaan anggaran dan evaluasi kinerja mempengaruhi akuntabilitas kinerja pegawai, meskipun pengaruhnya tidak terlalu kuat namun bisa jadi pertimbangan untuk kedepannya agar tidak terlalu membebani pegawai.

2. Implikasi praktik

Temuan pada penelitian ini bisa digunakan sebagai acuan untuk mengevaluasi dan mempertimbangkan pelaksanaan anggaran dan evaluasi kinerja supaya bisa menjadi pedoman untuk memajukan kinerja pegawai serta penelitian ini bisa menjadikan acuan agar kedepannya kinerja pegawai dapat meningkat semaksimal mungkin.

4.8 KETERBATASAN PENELITIAN

Penelitian ini sudah dilaksanakan sesuai prosedur ilmiah yang berlaku, namun disaat melaksanakan penelitian ini penulis mengalami adanya keterbatasan saat melakukan penelitian diantaranya :

1. Penelitian melibatkan sampel yang terbatas, responden dalam penelitian ini hanya terdapat 60 responden, hal ini membuat penelitian menjadi tidak maksimal dikarenakan kurangnya responden guna mempengaruhi seberapa kuat pengaruh variabel pelaksanaan anggaran, evaluasi kinerja terhadap akuntabilitas kinerja.
2. Keterbatasan dalam waktu, dengan waktu kurang lebih 3 bulan, peneliti harus berjalan dengan cepatnya dimana waktu peneliti terkendala oleh waktu cuti nasional, oleh karena itu peneliti harus mengejar waktu agar selesai sebelum batas waktu yang telah ditentukan.

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah selesai dilaksanakan pada Pengadilan Agama Jakarta Utara bisa diambil Kesimpulan bahwa :

1. Pengaruh pelaksanaan anggaran terhadap akuntabilitas kinerja bisa dilihat pada uji t dimana nilai t hitung pada variabel X1 $2,667 > 1,672$, dengan nilai sig $0,01 < 0,05$ maka pelaksanaan anggaran X1 berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja Y.
2. Pengaruh evaluasi kinerja terhadap akuntabilitas kinerja bisa dilihat pada uji t dimana nilai t hitung $1,096 < 1,672$, dengan nilai sig $0,278 > 0,05$ maka nilai dinyatakan tidak signifikan. Dapat disimpulkan bahwa evaluasi kinerja tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja Y.
3. Pengaruh pelaksanaan anggaran X1 dan evaluasi kinerja X2 terhadap akuntabilitas kinerja Y terdapat sebuah pengaruh yang dibuktikan dalam uji f terbukti bahwa variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat dengan nilai f hitung sebesar $4,644 > 3,159$ dan nilai signifikan $0,014 < 0,05$. Kesimpulannya bahwa variabel pelaksanaan anggaran dan evaluasi kinerja secara bersamaan berpengaruh positif terhadap variabel akuntabilitas kinerja.

5.2 SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka diajukan saran, sebagai berikut :

Pelaksanaan anggaran harus dilaksanakan dengan baik agar dapat membantu pemerintah daerah pada Pengadilan Agama Jakarta Utara agar dapat menciptakan akuntabilitas kinerja yang baik serta evaluasi kinerja lebih ditingkatkan agar kinerja selanjutnya dapat berjalan dengan optimal.

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

10%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	docplayer.info Internet Source	2%
2	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	1%
3	Submitted to IAIN Purwokerto Student Paper	1%
4	Submitted to Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta Student Paper	1%
5	pa-palangkaraya.go.id Internet Source	1%
6	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	1%
7	Submitted to Universitas Muhammadiyah Buton Student Paper	1%
8	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	1%
9	es.scribd.com	

1 %

10

samarinda.bpk.go.id

Internet Source

1 %

11

123dok.com

Internet Source

<1 %

12

garuda.kemdikbud.go.id

Internet Source

<1 %

13

ejournal.unsrat.ac.id

Internet Source

<1 %

14

Submitted to Universitas Negeri Jakarta

Student Paper

<1 %

15

core.ac.uk

Internet Source

<1 %

16

doku.pub

Internet Source

<1 %

17

www.researchgate.net

Internet Source

<1 %

18

download.garuda.kemdikbud.go.id

Internet Source

<1 %

19

conference.binadarma.ac.id

Internet Source

<1 %

20

repository.stikes-bhm.ac.id

Internet Source

<1 %

21	jbbe.lppmbinabangsa.id Internet Source	<1 %
22	text-id.123dok.com Internet Source	<1 %
23	www.coursehero.com Internet Source	<1 %
24	jurnal.ulb.ac.id Internet Source	<1 %
25	repository.unmuhjember.ac.id Internet Source	<1 %
26	etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source	<1 %
27	jurnal.pcr.ac.id Internet Source	<1 %
28	pdffox.com Internet Source	<1 %
29	skripsistie.files.wordpress.com Internet Source	<1 %
30	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1 %
31	Submitted to University of Leicester Student Paper	<1 %
32	dspace.uii.ac.id Internet Source	<1 %

33	pajak.go.id Internet Source	<1 %
34	repo.undiksha.ac.id Internet Source	<1 %
35	Submitted to Universitas Pendidikan Ganesha Student Paper	<1 %
36	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1 %
37	repository.ubb.ac.id Internet Source	<1 %
38	Submitted to Universitas Muhammadiyah Ponorogo Student Paper	<1 %
39	Submitted to Universitas Lancang Kuning Student Paper	<1 %
40	Submitted to Universitas Muria Kudus Student Paper	<1 %
41	eprints.perbanas.ac.id Internet Source	<1 %
42	repository.nobel.ac.id Internet Source	<1 %
43	repository.ub.ac.id Internet Source	<1 %

44	Rifahni Qivitiya, Sahnun Rangkuti, Al Firah. "PENGARUH KODE ETIK PERUSAHAAN DAN KOMITMEN KARYAWAN TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. LEON TESTING AND CONSULTANCY INDONESIA CABANG MEDAN", Jurnal Bisnis Corporate, 2024 Publication	<1 %
45	journal.jis-institute.org Internet Source	<1 %
46	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1 %
47	repositori.utu.ac.id Internet Source	<1 %
48	repository-feb.unpak.ac.id Internet Source	<1 %
49	Submitted to Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Student Paper	<1 %
50	repo.uinsatu.ac.id Internet Source	<1 %
51	repository.upbatam.ac.id Internet Source	<1 %
52	www.pta-yogyakarta.go.id Internet Source	<1 %
53	ejournal.unma.ac.id Internet Source	

<1 %

54

id.123dok.com

Internet Source

<1 %

55

repositori.uma.ac.id

Internet Source

<1 %

56

septianino.blogspot.com

Internet Source

<1 %

57

www.slideshare.net

Internet Source

<1 %

58

Angger Kusumodewi, Nazifah Husainah, Cecep Haryoto. "PENGARUH MOTIVASI, KOMPETENSI, KEPRIBADIAN DAN DISIPLIN TERHADAP KINERJA KARYAWAN", Perspektif, 2021

Publication

<1 %

59

Fediana Asriani Sekartaji, Suhendro Suhendro, Rosa Nikmatul Fajri. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Etis Mahasiswa Akuntansi", Owner (Riset dan Jurnal Akuntansi), 2020

Publication

<1 %

60

Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Student Paper

<1 %

61

digilib.iain-palangkaraya.ac.id

<1 %

62

ekobis.unisti.ac.id

Internet Source

<1 %

63

eprints.poltektegal.ac.id

Internet Source

<1 %

64

eprints.ubhara.ac.id

Internet Source

<1 %

65

jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id

Internet Source

<1 %

66

Lucyana Aprillya Simanjuntak, Hendrik Manossoh, Sintje Rondonuwu. "EVALUASI LAPORAN KINERJA INSTITUSI PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) PROVINSI SULAWESI UTARA", GOING CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI, 2020

Publication

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off